

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah di Indonesia memainkan peran dalam perekonomian, mengingat mayoritas penduduk yang beragama Islam. Salah satu lembaga tersebut adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Pekalongan yang berkomitmen pada prinsip-prinsip syariah, dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peran dan fungsi DPS di KSPPS BTM Pekalongan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pengawasan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan emik, yang memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi dengan pengambilan sampel purposive untuk memilih informan yang relevan dan memiliki pengetahuan terbaik tentang topik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS menjalankan pengawasan dan bimbingan syariah melalui nasihat, penilaian produk, serta monitoring dan evaluasi berkala. DPS juga aktif berkolaborasi dengan DSN-MUI. Namun tantangan yang dihadapi DPS termasuk status yang tidak tetap, keterbatasan otoritas dalam penegakan prinsip syariah, dan jumlah anggota yang terbatas untuk mengawasi banyak cabang. DPS mengatasi hal tersebut dengan memanfaatkan teknologi digital, memperkuat monitoring, dan berkolaborasi dengan pengurus. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem pengawasan syariah di lembaga keuangan mikro syariah dan bahan evaluasi bagi kebijakan pengawasan keuangan syariah.

Kata kunci : Implementasi peran dan fungsi, DPS, KSPPS BTM Pekalongan

ABSTRACT

Islamic financial institutions in Indonesia play a crucial role in the economy, particularly because the majority of the population adheres to Islam. One prominent example is the Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Pekalongan, which is dedicated to adhering to sharia principles, with the Sharia Supervisory Board (DPS) serving as the primary regulatory body. This study aims to analyze the role and functions of the DPS at KSPPS BTM Pekalongan and to identify the challenges encountered in fulfilling its supervisory responsibilities. The research employs a qualitative approach with an emic perspective, enabling a comprehensive understanding of the phenomena under study. Data collection techniques include in-depth interviews and observations, utilizing purposive sampling to identify relevant informants who possess the best knowledge of the topic.

The research findings indicate that the Sharia Supervisory Board (SPS) conducts sharia supervision and guidance through various means, including providing advice, assessing products, and performing periodic monitoring and evaluations. Additionally, the SPS actively collaborates with the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). However, the SPS faces several challenges, such as an unstable status, limited authority to enforce sharia principles, and a small number of members tasked with overseeing many branches. The SPS addresses these challenges by leveraging digital technology, enhancing monitoring efforts, and collaborating closely with management. This research aims to contribute to the advancement of sharia supervisory systems in Islamic microfinance institutions and to offer evaluation material for sharia financial supervisory policies.

Keywords: *Implementation of The Role and Function, DPS, KSPPS BTM Pekalongan*